

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam Pagar Tansel, perkembangan harga komoditas pangan selama Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif, terutama pada kelompok komoditas hortikultura. Pada bulan April 2026, komoditas dengan volatilitas harga tertinggi adalah cabai rawit, sedangkan pada bulan Mei dan Juni volatilitas tertinggi bergeser pada cabai rawit merah. Perubahan harga tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi pasokan dari daerah produsen serta faktor musiman yang memengaruhi ketersediaan komoditas di pasar. Berdasarkan hasil pemantauan harga, pada bulan April komoditas yang mengalami kenaikan harga tertinggi adalah jeruk dan cabai merah. Memasuki bulan Mei, kenaikan harga masih didominasi oleh cabai merah dan cabai rawit merah akibat terganggunya pasokan. Sementara itu, pada bulan Juni harga relatif lebih stabil dan kenaikan hanya terjadi pada pekan terakhir, terutama pada komoditas cabai rawit merah. Di sisi lain, penurunan harga terdalam pada bulan April terjadi pada cabai rawit merah, sedangkan pada bulan Mei tidak terdapat penurunan harga yang signifikan. Pada bulan Juni, penurunan harga terjadi pada lebih banyak komoditas dengan koreksi terdalam pada cabai merah dan bawang merah.

Perubahan harga pada bulan April dipengaruhi oleh normalisasi permintaan pasca-Lebaran serta meredanya faktor musiman. Perhitungan Indeks Perkembangan Harga (IPH) bulan April menggunakan data akhir Maret yang masih mencerminkan tingginya konsumsi selama Ramadan dan Idulfitri, sehingga pada April terjadi penyesuaian harga seiring menurunnya permintaan masyarakat. Pada bulan Mei, tekanan harga kembali meningkat akibat curah hujan tinggi di sejumlah daerah sentra produksi yang menyebabkan penurunan hasil panen komoditas hortikultura. Selain itu, kenaikan harga minyak goreng dipicu oleh meningkatnya harga Crude Palm Oil (CPO) di pasar global. Pada periode yang sama, lonjakan harga minyak dunia turut meningkatkan biaya distribusi dan transportasi sehingga mendorong kenaikan harga berbagai komoditas secara lebih luas. Selanjutnya, pada bulan Juni terjadi koreksi harga karena memasuki masa panen raya di berbagai sentra produksi yang meningkatkan pasokan dan menurunkan harga secara alami. Kondisi tersebut menjadikan IPH bulan Juni sebagai salah satu periode dengan penurunan terdalam selama Semester I Tahun 2026.

Ke depan, tekanan inflasi masih berpotensi muncul dari sisi pasokan maupun biaya distribusi. Produksi komoditas hortikultura sangat bergantung pada kondisi cuaca, sehingga peringatan BMKG mengenai potensi El Niño berkepanjangan dapat mengganggu produktivitas pertanian dan mengurangi pasokan. Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi meningkatkan biaya bahan baku industri, barang modal, maupun produk konsumsi impor. Risiko lainnya berasal dari kenaikan harga bahan bakar non-subsidi dan tarif angkutan udara yang dapat meningkatkan biaya logistik dan distribusi barang, sehingga memberikan tekanan lanjutan terhadap harga komoditas di tingkat konsumen.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Permasalahan utama pengendalian inflasi di Kota Tangerang Selatan masih berkaitan dengan aspek ketersediaan pasokan, distribusi, dan keterjangkauan harga. Dari sisi ketersediaan pasokan, Kota Tangerang Selatan sebagai daerah konsumen masih sangat bergantung pada pasokan komoditas pangan dari luar daerah. Kondisi tersebut menyebabkan stabilitas harga

sangat dipengaruhi oleh situasi produksi di daerah pemasok. Di samping itu, kerja sama antardaerah belum berjalan secara optimal. Kerja sama yang telah terbangun masih sebatas Government to Government (G2G) dan belum berkembang menjadi skema Business to Business (B2B), sehingga belum mampu menjamin kontinuitas pasokan maupun efisiensi distribusi komoditas pangan.

Pada aspek distribusi, belum tersedianya pasar induk di Kota Tangerang Selatan menjadi salah satu hambatan utama dalam menjaga efisiensi rantai pasok. Saat ini, mayoritas pedagang memperoleh pasokan dari Pasar Tanah Tinggi Kota Tangerang, Pasar Induk Kramat Jati, dan Pasar Kemang Bogor. Kondisi tersebut menyebabkan biaya logistik menjadi lebih tinggi karena frekuensi mobilitas pedagang meningkat dan pembelian dilakukan secara terpisah dalam jumlah relatif kecil. Selain itu, sistem informasi persediaan pangan yang terintegrasi dengan informasi harga juga belum tersedia, sehingga pemerintah daerah belum dapat memantau kondisi stok di masing-masing pasar secara real time. Keterbatasan informasi dari pedagang mengenai jumlah persediaan yang dimiliki menyebabkan potensi kekurangan pasokan di suatu pasar sulit dideteksi sejak dini, sehingga berpotensi memicu kenaikan harga.

Dari aspek keterjangkauan harga, data BPS menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kota Tangerang Selatan pada tahun 2025 sebesar Rp2.660.127 per bulan, dengan komposisi pengeluaran didominasi oleh kelompok bukan makanan sebesar 62,29 persen dan kelompok makanan sebesar 37,71 persen. Pada kelompok makanan, proporsi pengeluaran terbesar berasal dari makanan dan minuman jadi atau olahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kenaikan harga yang dirasakan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh harga bahan baku pangan, tetapi juga oleh meningkatnya biaya produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran makanan olahan. Oleh karena itu, pengendalian inflasi perlu memperhatikan seluruh rantai pasok agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Sebagai daerah yang bergantung pada pasokan dari luar wilayah, Kota Tangerang Selatan terus melaksanakan berbagai kebijakan pengendalian inflasi melalui strategi 4 K, yaitu ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif. Dari sisi ketersediaan pasokan, pemerintah daerah telah mendorong pelaksanaan kerja sama antar daerah, meskipun hingga Triwulan II Tahun 2026 implementasinya masih terbatas pada tahap Government to Government (G2G) dan belum mencapai kerja sama Business to Business (B2B). Penguatan cadangan pangan juga telah masuk dalam Peta Jalan Pengendalian Inflasi Tahun 2026, namun hingga akhir Triwulan II belum dilakukan pembelian kembali untuk memperkuat stok cadangan daerah. Monitoring stok distributor secara rutin dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui pemantauan pada agen, ritel, dan toko modern. Selain itu, Perum Bulog Divre Tangerang sebagai anggota TPID turut berperan dalam penyediaan beras SPHP dan komoditas pangan lainnya yang disalurkan melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah. Pemerintah daerah juga tetap melaksanakan program RW Mantap sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan ditingkat RW melalui pemanfaatan lahan fasilitas umum.

Pada aspek keterjangkauan harga, selama Triwulan II Tahun 2026 tidak dilaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM). Intervensi harga dilakukan melalui Operasi Pasar yang diselenggarakan di Kelurahan Pondok Kacang Barat dan Kelurahan Sawah. Selain itu,

penyaluran bantuan pangan telah dilaksanakan pada bulan Maret 2026 dengan jumlah penerima sebanyak 74.691 keluarga penerima manfaat. Pengawasan terhadap stabilitas harga dan keamanan pangan juga dilakukan melalui inspeksi mendadak menjelang Idul adha di Pasar Serpong dan Pasar Alam Sutera yang melibatkan Forkopimda dan BPOM.

Dalam aspek komunikasi efektif, Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara rutin mempublikasikan perkembangan harga pangan melalui aplikasi Pagar Tangsel yang diperbarui setiap hari berdasarkan hasil pemantauan di tujuh pasar. Selama Triwulan II Tahun 2026 telah dilaksanakan dua kali rapat koordinasi TPID dan satu kali High Level Meeting yang menghasilkan arahan untuk mengintensifkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah maupun Operasi Pasar di wilayah dengan skor Sistem Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) yang rendah. Pendekatan ini diharapkan mampu mendukung dua tujuan sekaligus, yaitu menjaga ketahanan pangan masyarakat serta mengendalikan inflasi daerah karena indikator SKPG juga mempertimbangkan fluktuasi harga komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, dan telur ayam ras.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Secara umum, pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan hasil yang cukup positif. Harga komoditas penyusun Indeks Perkembangan Harga (IPH) cenderung mengalami penurunan pada sebagian besar periode, kecuali pada bulan Mei ketika terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan pada komoditas cabai merah, minyak goreng, dan jeruk. Namun demikian, kenaikan tersebut bersifat sementara karena meningkatnya pasokan pada awal Juni mampu mendorong terjadinya koreksi harga sehingga tren kenaikan tidak berlanjut. Selain itu, komoditas jeruk dan cabai merah yang mengalami kenaikan harga bukan merupakan kelompok dengan kontribusi pengeluaran terbesar masyarakat. Berdasarkan data Susenas Tahun 2024, rata-rata proporsi pengeluaran per kapita untuk kelompok bumbu, minyak dan kelapa, serta buah-buahan masing-masing hanya sebesar 0,80 persen, 0,85 persen, dan 2,29 persen, sehingga dampaknya terhadap daya beli masyarakat secara keseluruhan relatif terbatas.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi kebijakan pengendalian inflasi. Tidak dilaksanakannya Gerakan Pangan Murah selama Triwulan II menyebabkan volume intervensi pemerintah terhadap harga pangan menjadi relatif kecil. Selain itu, pelaksanaan GPM maupun Operasi Pasar yang berbasis permintaan wilayah belum berjalan optimal karena hingga saat ini belum terdapat usulan dari wilayah sasaran. Padahal, penyediaan komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, dan telur melalui GPM berpotensi mengurangi pembelian masyarakat di pasar umum yang harganya tidak dikendalikan. Apabila intervensi dilakukan secara lebih luas dan berkelanjutan, maka tekanan permintaan di pasar komersial dapat berkurang sehingga turut mendukung stabilitas harga secara keseluruhan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi daerah, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar perlu diintensifkan dengan mengacu pada hasil pemetaan Sistem Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG), khususnya pada wilayah yang memiliki

skor kerawanan rendah namun menunjukkan frekuensi kenaikan harga komoditas strategis yang tinggi. Pemerintah daerah perlu melakukan koordinasi lebih awal dengan pemerintah kewilayahan agar lokasi dan jadwal pelaksanaan GPM maupun Operasi Pasar dapat dipersiapkan secara optimal. Selain itu, evaluasi terhadap hasil pemantauan SKPG perlu dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi komoditas yang paling sering mengalami kenaikan harga, sehingga intervensi dapat difokuskan pada komoditas tersebut.

Pelaksanaan GPM dan Operasi Pasar juga perlu dilakukan secara berkesinambungan, tidak hanya bersifat insidental. Apabila masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok utama seperti beras, minyak goreng, dan telur dengan harga yang lebih terjangkau melalui GPM, maka kebutuhan pangan rumah tangga dapat dipenuhi untuk jangka waktu tertentu sehingga mengurangi tekanan permintaan di pasar umum. Strategi ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok masyarakat berpendapatan menengah yang tidak menerima bantuan sosial, sekaligus menciptakan mekanisme penurunan harga melalui sisi permintaan. Dengan demikian, pengendalian inflasi daerah tidak hanya berfokus pada stabilisasi harga jangka pendek, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.